

MODERASI BERAGAMA: DARI INDONESIA UNTUK DUNIA

Babun Suharto, et. all

©LKIS, 2019

xiv + 410 halaman; 14,5 x 21 cm

ISBN: 978-623-7177-10-4

Sambutan: Direktur Jenderal Pendidikan Islam Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA

Editor: Ahmala Arifin

Rancang Sampul: Cak Narto

Penata Isi: Tim Redaksi LKiS

Penerbit & Distribusi:

LKIS

Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 387194

Faks.: (0274) 379430

<http://www.lkis.co.id>

e-mail: lkis@lkis.co.id

Anggota IKAPI

Cetakan I: 2019

Percetakan:

LKIS

Salakan Baru No. 3 Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 417762

e-mail: lkis.printing@yahoo.com

DAFTAR ISI

Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Islam: Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA ____v

Kata Pengantar Ketua Forum Pimpinan PTKIN: Prof. Dr. H. Babun Suharto, MM ____ix

Daftar Isi ____xi

1. Moderasi Beragama dan Masa Depan Tradisi Keilmuan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia
Babun Suharto (Rektor IAIN Jember) ____1
2. Penguatan Moderasi Islam Indonesia dan Peran PTKIN
TGS Saidurrahman (Rektor UIN Sumatera Utara) ____15
3. Implementasi Moderasi Beragama di Lingkungan PTKIN
K.H. Akhmad Mujahidin (Rektor UIN Syarif Kasim Riau) ____41
4. Moderasi Karakter Asli Agama Islam
Mahmud (Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung) ____67
5. Moderasi Agama; Memperkuat Fungsi Kekhalifahan dalam Budaya Global
Samsul Nizar (Ketua STAIN Bengkalis-Riau) ____81

6. Hakekat Moderasi Beragama
H. Muhibbin (Rektor UIN Walisongo Semarang) _____105
7. Rekonstruksi Moderasi Beragama (Suara Minor Cendekiyah Poros Intim)
Idrus Al-Hamid (Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua) _____119
8. Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Sistem Kekeluargaan Masyarakat Dalihan Natolu
H. Ibrahim Siregar (Rektor IAIN Padangsidempuan) _____143
9. Epistemologi Sosial Keberagamaan Masyarakat: Studi Genealogi Islam Jawa
H. Mudzakir (Rektor IAIN Kudus) _____175
10. Proporsionalisasi Makna Jihad (Satu Titik Ikhtiar Deradikalisasi)
Syarif (Rektor IAIN Pontianak) _____215
11. Islam dan Multikulturalisme
Andi Nuzul (Rektor IAIN Bone) _____231
12. Beragama dalam Masyarakat Plural
Hasbollah Toisuta (Rektor IAIN Ambon) _____245
13. Argumen Pengarusutamaan Budaya dan Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) dalam Proyek Moderasi Beragama di Indonesia
H. Mudofir Abdullah (Rektor IAIN Surakarta) _____265
14. Moderat Menyikapi yang Sesat
Mujiburrahman (Rektor UIN Antasari Banjarmasin) _____289

15. Kearifan Lokal dalam Bingkai Islam Moderat (Sebuah Konsep untuk Implementasi pada IAIN Palu)
H. Segaf S. Pettalongi (Rektor IAIN Palu) ____303
16. Merawat Keragaman dengan Dakwah Islam
Mukhamad Ilyasin (Rektor IAIN Samarinda) ____323
17. Moderasi Islam Indonesia: Penguatan Pancasila sebagai Dasar Negara
Moh. Mukri (Rektor UIN Raden Intan Lampung) ____341
18. Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah Menurut Syekh Arsyad Al-Banjari
Khairil Anwar (Rektor IAIN Palangka Raya) ____361
19. Menyoal Moderasi Islam
KH. Fauzul Iman (Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten) ____383
20. Cetak Biru Moderasi Beragama: Urgensi Panduan Normatif dan Aplikatif
Masdar Hilmy (Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya) ____399

BERAGAMA DALAM MASYARAKAT PLURAL

Hasbollah Toisuta
Rektor IAIN Ambon

SECARA HISTORIS bangsa Indonesia, sejak lahirnya merupakan bangsa yang pluralis. Bahkan jauh sebelum adanya imajinasi kebangsaan atau kesadaran akan negara bangsa, realitas kebhinekaan ini sudah tertancap kokoh di bumi Nusantara. Dari sisi geografis Indonesia terdiri dari 17,504 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke, di antaranya terdapat 11 ribu pulau yang telah berpenghuni dengan 359 suku dan sub suku serta 762 bahasa. Dari aspek agama Indonesia memiliki lima agama resmi ditambah dengan agama Konghucu yang baru saja dimasukkan – menjadi agama keenam – pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Meskipun hanya enam agama, di dalam masing-masing agama tersebut juga terdapat berbagai aliran, sekte, denominasi dengan berbagai organisasi sosial yang mendukungnya, disamping terdapat pula ratusan kepercayaan lokal (agama suku) yang berkembang hingga saat ini. (www.ethnologue.com dan www.wikipedia.com). Gambaran ini cukup memberi perspektif bagi kita bahwa plularalitas bangsa menjadi modal penting dalam mbingkai potret ke-Indonesia-an kita.

Meskipun demikian pengakuan atas pluralitas bangsa ini belum mencapai tataran substansialnya. Artinya kesadaran akan keberagaman ini baru sebatas di permukaan. Hal ini ditandai dengan seringnya terjadi konflik-konflik sosial bernuansa SARA yang belakangan (baca: pasca reformasi) kerap terjadi. Selama 30 tahun rezim Orde Baru merayakan pluralitas dalam artian fisik, tetapi pada saat bersamaan menekan pluralitas substansial dalam rangka memelihara stabilitas nasional. Muatan-muatan pelajaran tentang suku bangsa, adat istiadat, bahasa, keragaman agama dan toleransi, diekspose ke ranah publik saat itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan penyeragaman kebudayaan yang dilakukan pemerintah melalui pelbagai kebijakan pembangunan.

Sebagai akibatnya, pasca reformasi hingga saat ini kita masih terus dikejutkan oleh pelbagai konflik dan kekerasan sosial yang bersifat massif di pelbagai daerah yang melibatkan suku, agama, ras, ataupun antar golongan (SARA). Kerusakan antar suku di Kalimantan Barat, perang saudara yang berbeda agama di Maluku dan Poso, konflik antar aliran-aliran keagamaan di Jawa dan lain sebagainya yang kesemuanya memakan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit jumlahnya. Kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa problema pluralisme bangsa sesungguhnya "belum selesai". Hal ini menunjukkan upaya membangun kesadaran peluralisme dan multikulturalisme merupakan sebuah keniscayaan yang harus terus dilakukan secara berkesinambungan serta membutuhkan kerja-kerja sosial secara integratif melalui pelbagai kebijakan pembangunan.

Tulisan ini ingin mendiskusikan tentang bagaimana membangun sikap keberagaman yang saling menghargai keragaman dalam rangka membangun bangsa yang damai dengan memotret pengalaman Maluku dan peran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dalam mendorong perdamaian di Maluku.

Memahami Akar Pluralitas Bangsa dan Masalahnya

Pada hampir semua negara di dunia dewasa ini tidak lagi kita temukan masyarakat yang relatif homogen. Setiap bangsa yang berpandangan modern dan demokratis dituntut untuk menghargai pluralitas atau keragaman. Tidak hanya dengan bangsa Indonesia, problema pluralisme dan multikulturalisme dewasa ini telah menjadi problema kontemporer semua bangsa di dunia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang komunikasi, informasi dan transportasi, telah merubah tatanan dunia dan meniscayakan perjumpaan-perjumpaan masyarakat secara intens lintas kawasan, baik pada level lokal, antar negara, antar budaya, bahkan antar agama. Fenomena ini mengisyaratkan adanya tantangan nyata bagi pluralisme dan karena itu pluralisme menjadi problema masyarakat global. Di negara-negara barat seperti Amerika, Prancis, Inggris, dan Kanada, pluralisme dan multikulturalisme juga merupakan masalah pelik yang dihadapi dan menuntut pandangan-pandangan filosofis mengenai politik kebudayaan baru yang harus didefinisikan untuk kepentingan pembangunan negaranya.

Pluralitas atau keragaman dalam pengertiannya yang paling radikal sesungguhnya berkaitan dengan perbedaan yang ada pada manusia (Mubarak, 2010). Bahwa masing-masing manusia memiliki perbedaan, baik identitas, cara pandang, cara berfikir, serta kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sosialnya. Perbedaan di antara manusia itu sendiri merupakan hal yang niscaya terutama karena manusia memiliki keterbatasan pada aspek inderawi, pola berfikir maupun bahasa. Interaksi manusia melalui perangkat-perangkat terbatas tersebut kemudian mewujudkan pluralitas pada saat manusia menyatakan diri di ruang publik. Proses interaksi antar individu ataupun kelompok di ranah publik

melahirkan persamaan atau perbedaan dan pada saat itulah timbul identifikasi sosial berdasarkan persamaan dan perbedaan, mulai dari lingkup kecil (keluarga) hingga yang terbesar (bangsa). Sebagai contoh saya menemukan diri saya sebagai orang Ambon karena saya merasa memiliki kesamaan identitas tertentu dengan orang Ambon yang lain. Persamaan-persamaan yang teridentifikasi dalam kelompok itulah yang dikenal dengan identitas (Mubarak, 2010).

Identitas sosial adalah merupakan hasil dari konstruksi sosial. Seseorang bisa terkonstruksi secara sosial memiliki identitas ganda atau plural. Saya mengidentikkan diri saya sebagai orang Indonesia ketika saya berada di tengah masyarakat internasional. Tetapi pada saat saya sedang berada di Indonesia, saya mengidentikkan diri saya sebagai orang Ambon, Maluku. Sebagai warga Maluku saya punya identitas lain sebagai anak pulau Saparua (Lease). Dari aspek agama, saya bisa mengidentikkan diri saya sebagai seorang Muslim, sementara di dalam identitas Muslim pun saya masih melompat ke identitas Muhammadiyah atau NU. Demikian pula individu yang lain memiliki identitas sosial yang mungkin sama atau berbeda dengan saya. Dengan demikian pluralitas atau pluralisme adalah suatu perspektif sosial mengenai kesadaran akan keragaman kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara, atau keragaman kepercayaan ataupun sikap diri suatu badan, kelembagaan dan sebagainya. (Masykuri Abdillah, 1999: 4).

Dalam kenyataannya, identitas sosial yang berbeda (plural) tersebut mengeras pada kelompok-kelompok sosial dengan latar belakang kepentingan yang beragam. Proses interaksi kelompok-kelompok sosial tersebut di tengah-tengah masyarakat tidak selamanya berjalan secara harmonis. Selalu saja terdapat gesekan, benturan bahkan konflik. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan politik, ekonomi, sosial yang diperankan agar setiap

kelompok dapat mempertahankan eksistensinya. Masing-masing kelompok sosial merasa benar untuk menghakimi dan meminggirkan kelompok lain di ruang publik. Dari sinilah muncul apa yang disebut politik identitas.

Di Indonesia masalah yang biasanya kita hadapai dengan pluralitas dalam perspektif politik identitas adalah apa yang kita sebut dengan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Pada saat rezim Orde Baru, isu-isu politik SARA memang relatif terkendali. Seperti disinggung di atas bahwa rezim Orde Baru berhasil memporong kesadaran pluralitas dalam artian fisik, tetapi mengabaikan pluralitas substansial. Kebhinekaan yang sering menjadi alat retorika rezim Orde Baru, dalam prakteknya justru menunjukkan sikap berbalikan berupa pendekatan ke-ika-an. Akibatnya adalah masyarakat menjadi phobia untuk memperdebatkan perbedaan atau pluralitas substansial (Toisuta, 2010: xvii). Dengan pendekatan seperti ini, SARA dianggap sesuatu yang sangat berbahaya, rentan dan eksplosif, sehingga setiap isu yang terindikasi bermotifkan SARA secepatnya diredam dengan alasan. Konflik-konflik sosial yang terjadi pasca reformasi seperti peristiwa Ketapang, Ambon, Maluku, Maluku Utara, Poso, Kalimantan Barat, Sambas, Tasikmalaya, Madura dan lainnya - yang kebanyakan diboncengi isu SARA - menunjukkan betapa rapuhnya pendekatan stabilitas Orde Baru yang sifatnya *top-down* itu.

Setelah dua puluh tahun reformasi saat ini artikulasi politik identitas (SARA) tampaknya masih semakin "beringas". Proses demokrasi belum mampu untuk mengkanalisasi sentimen-sentimen SARA. Seirama dengan melemahnya peran negara dalam mengendalikan stabilitas. Aksi-aksi kekerasan seperti terorisme, radikalisme, baik dalam bentuk bom bunuh diri ataupun gerakan ideologis yang berseberangan dengan ideologi negara Pancasila, relatif masih menjadi diskursus saat ini. Hal ini berarti kesadaran

akan pluralitas bangsa semakin menipis dan harus menjadi perhatian bersama.

Agama, Konflik dan Kesadaran Pluralisme

Pertanyaan-pertanyaan yang sering menjadi renungan kita ketika menyaksikan konflik agama adalah, mengapa terjadi konflik agama? Bukankan semua agama sarat akan pesan moral tentang cinta kasih, perdamaian dan persaudaraan? Lalu mengapa antar sesama pemeluk agama saling membunuh dan menghancurkan demi keyakinan akan agamanya. Apakah memang agama itu sendiri mengandung potensi destruktif?

Ahli psikologi agama seperti Yinger (Schart, 1995: 97), berpendapat bahwa setiap manusia baik perorangan maupun kelompok pada dasarnya membutuhkan agama. Agama merupakan kebutuhan ideal manusia karena di dalamnya terdapat serangkat nilai yang memberi perspektif moral terhadap tujuan hidup manusia. Agama secara teologis maupun sosiologis dapat dipandang sebagai instrumen Illahiyah untuk “memahami” dunia. Tanpa agama kehidupan manusia menjadi absurd. Agama menempati posisi sentral dalam kehidupan manusia. Hal ini berkaitan dengan aspek yang paling mendasar dari kehidupan manusia itu sendiri, yaitu bahwa pada diri manusia terdapat naluri atau “fithrah” untuk beragama (baca: berketuhanan). Dalam filsafat agama diketahui bahwa pencarian akan Tuhan dan agama merupakan suatu problema pencarian sepanjang sejarah umat manusia. Manusia awal, secara sederhana mulai mencari Tuhan melalui kekuatan benda-benda alam seperti gunung, matahari, bintang, api, hewan, dan sebagainya yang diyakini memiliki “kuasa” dalam mengendalikan alam dan kehidupannya, hingga kemudian datangnya agama-agama formal yang relatif mulai menuntun - berdasarkan norma-norma syariat - manusia menuju

kepada tuhan. Melalui norma dan nilai-nilainya, agama selanjutnya diyakini manusia menjadi panduan hidup (*the way of life*), yang memberi jawaban terhadap persoalan hidup dan matinya. Maka inti dari pada nilai-nilai dasar setiap agama adalah membangun kesadaran pemeluknya tentang adanya Allah sebagai zat yang transendental, berkuasa dan Maha sempurna, serta memberi perspektif moral etik terhadap masalah pergaulan sosial kemanusiaan dalam arti yang luas.

Dalam perspektif tersebut, tesis kaum sekularis yang mencoba meramalkan nasib agama di dunia modern dengan memosisikan agama sebagai subordinat dalam kaitannya dengan kemajuan sains dan teknologi merupakan sesuatu yang tidak relevan, bahkan tidak dapat dibuktikan. Kerena berbagai fakta empiris membuktikan bahwa posisi agama dalam kehidupan manusia selamanya masih tetap menjadi kebutuhan.

Para sosiolog berpendapat setiap agama memiliki dua sisi yang masing-masing berbeda namun tidak dapat dilepaspisahkan. *Pertama*, agama yang berada pada tataran normatifitas (nilai) yang bersifat eternal. Yang *kedua*, agama yang terjelma dalam wilayah historisitas, yaitu ketika nilai-nilai eternal agama yang universal memasuki wilayah budaya (Amin Abdullah: 1996). Ketika nilai-nilai universal agama memasuki dimensi historisitas atau budaya (baca: kepemelukan manusia) maka agama terintegrasi dengan persoalan-persoalan praktis kehidupan manusia yang sifatnya aktual. Agama secara empiris berhubungan dengan berbagai persoalan kemasyarakatan. Pada level ini, agama, budaya dan masyarakat saling mempengaruhi atas dasar kepentingan manusia, baik kepentingan politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Di sinilah nilai-nilai universalitas agama bisa mengalami distorsi. Agama bisa dipakai untuk menjustifikasi suatu kepentingan politik, ekonomi, bilamana agama tersebut telah membentuk identitas sosial ataupun politik.

Perspektif politik identitas agama pada gilirannya melahirkan pandangan sektarianisme sempit. Agama diideologisasi dan menjadi alat perjuangan kelompok tertentu. Muncul sikap klaim mengenai siapa yang benar dalam beragama (*truth claim*) dan siapa yang bakalan mendapatkan keselamatan (*salvation claim*).

Truth claim (klaim kebenaran) serta *salvation claim* (klaim keselamatan) sangat berpotensi memicu konflik manakala sikap ini didasari dengan cara pandangan teologi yang eksklusif. Teologi Eksklusif memandang bahwa penganut agama lain tidak akan selamat dan menjadi tugas sucinya untuk menyelamatkannya (Alwi Sihab, 1998: 84). Corak beragama dengan pandangan eksklusif mengkonstruksi cara berfikir masyarakat menjadi tidak obyektif di dalam menilai diri sendiri maupun orang lain. Misalnya dalam menilai konflik masing-masing menganggap diri berada pada posisi yang benar dan dikorbankan. Sangat sulit untuk terbuka terhadap kekurangan dan kesalahan yang telah dilakukan.

Dalam suatu tatanan masyarakat plural agama yang berpandangan eksklusif, tidak mungkin dicapai suatu toleransi yang sejati, karena masing-masing pihak berada dalam suasana keterisolasian diri dan kelompoknya. Toleransi yang dibangun hanyalah toleransi yang semu atau menurut istilah Paul Knitter dengan "*lazy tolerance*" atau toleransi yang malas. Pelbagai konflik agama yang terjadi di Indonesia belakangan ini menunjukkan masih kuatnya pandangan eksklusifitas masyarakat kita. Belum lagi masalah-masalah sosial politik yang sering memunculkan ketegangan dan krisis di antara pemeluk agama, hal ini kian menambah runyamnya problematika pluralisme bangsa.

Pola keagamaan yang eksklusif berhadapan dengan dinamika perubahan sosial masyarakat yang berkembang dengan cepat dapat menjadi "bom waktu" bagi hubungan agama-agama ke masa

depan. Salah seorang ilmuwan sekular yang melihat bahwa munculnya krisis akibat kompleksitas hubungan antara umat beragama adalah Arthur J. D'Adamo. Bagi D'Adamo, penulis *science withouth bonds, A Synthesis of Science, Relegion and Mystics* (1995) ini, bahwa "cara memahamii agama secara eksklusif justru menjadi akar seluru konflik antara umat beragama yang timbul kemudian. Karakteristik pemahaman agama yang eksklusif, demikian D'Adamo berangkat dari sebuah paradigma bahwa hanya agama dan kitab sucinyalah sumber kebenaran, dan sepenuhnya diyakini sebagai: 1) bersifat konsisten dan berisi kebenaran-kebenaran yang tanpa kesalahan sama sekali; 2) bersifat lengkap dan final – dan karena itu memang tidak memerlukan kebenaran dan agama lain; 3) kebenaran agama sendiri dianggap merupakan satu-satunya jalan keselamatan, pencerahan dan pembebasan, dan 4) seluruh kebenaran itu diyakini original dari Tuhan dan bukan konstruksi manusia. (Budhi Munawar Rahman : 1996).

Akar krisis epistemologis yang diungkapkan D'Adamo, jelas bisa mengejutkan banyak orang, terlebih mereka yang bersama secara taat. Semestinya semakin orang beragama membuatnya semakin baik, tetapi dalam kenyataannya banyak orang beragama merasa paling berhak untuk menghakimi dan membunuh orang lain, tentu hal ini bertentangan dengan *mission sacre* kehadiran agama dalam kehidupan umat manusia. Maka kritik D'Adamo sebenarnya agar umat beragama perlu melakukan upaya transformasi pemahaman dan perilaku beragama, dari beragama secara eksklusif dan konflikual menjadi beragama yang pluralis, cinta damai dan pro-kehidupan.

Untuk melakukan transformasi pemahaman dan sikap keberagamaan yang menghargai perbedaan dan harus dimulai dengan perubahan *mindset*. Yaitu merubah sikap dan pandangan eksklusifisme dengan mengarah kepada kesadaran inklusifisme

atau Pluralisme. Pluralisme adalah suatu pandangan yang tidak semata menunjuk pada kenyataan akan kemajemukan. Lebih dari itu yang dimaksudkan adalah "Keterlibatan aktif" terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam khebinekaan. (Alwi Shihab : 1996 : 41).

Membangun Kesadaran Hidup Bersama, Belajar dari Kasus Maluku

Seperti diketahui bersama bahwa masyarakat Maluku pernah mengalami masa suram konflik sepanjang 4 tahun (1999-2003). Konflik sosial tersebut telah mengharubirukan kehidupan orang Maluku mengakibatkan begitu banyak korban jiwa dan harta benda. Sebuah peristiwa yang tidak hanya merontokkan kesadaran pluralisme masyarakat, tapi lebih dari itu telah meruntuhkan relasi-relasi kehidupan orang basudara yang awalnya hidup rukun dan damai dalam bingkai-bingkai kearifan lokalnya. Konflik Maluku dipersepsikan sebagai konflik bernuansa SARA (Islam-Kristen). Meskipun demikian banyak variabel non agama yang juga merupakan bagian dari dinamika konflik tersebut. Selama konflik berlangsung orang Maluku seakan hidup tanpa nilai-nilai, kehilangan pijakan etik, bahkan mengalami peniadaan identitas kultural, kehilangan rasa saling percaya (*distrust*), dan muncul sikap saling curiga.

Setelah keluar dari pusaran konflik, maka masalah yang dihadapi sekarang ini adalah bagaimana masyarakat Maluku harus membangun dan memelihara integrasi sosialnya untuk jangka panjang. Disadari sungguh bahwa upaya memelihara perdamaian

di Maluku tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab semua elemen masyarakat Maluku itu sendiri. Artinya meskipun upaya pihak eksternal telah ditempuh dalam membangun integrasi namun bila hal ini tidak didukung oleh masyarakat, maka konflik sewaktu-waktu bisa saja terjadi.

Dilihat dari perspektif sosial antropologis, hubungan masyarakat Islam dan Kristen di Maluku yang sering diwarnai oleh ketegangan dan konflik, telah menciptakan masyarakat yang tersegrasi. Dalam konteks teologi, Islam dan Kristen yang berkembang di Maluku dalam sejarahnya tidak memiliki pengalaman dialog yang cukup dan peran yang optimal untuk mendamaikan. Pola pemahaman agama masyarakat Islam dan Kristen sangat konfliktual, karena menganut teologi eksklusif. Berkaitan dengan itu untuk mengatasi pandangan teologi eksklusif serta berbagai bentuk permasalahan yang ditimbulkannya dalam relasi agama-agama di Maluku, perlu dibangun suatu hubungan persaudaraan yang lebih sejati dengan teologi yang berbasis pada kesadaran akan pluralitas sebagai landasan hidup bersama dalam masyarakat heterogen.

Teologi yang berbasis pada realitas kultur masyarakat Maluku yang pluralis membuat masyarakat dapat hidup dalam perbedaan dan siap untuk saling menyapa. Dengan teologi pluralis seseorang dapat menerima realitas pluralisme bukan sekedar mengakui dan mengatakan bahwa manusia atau masyarakat itu majemuk, beranekaragam yang terdiri dari berbagai suku, agama dan bahasa yang hanya terkesan pragmentasi, karena yang demikian bukan pluralisme yang sebenarnya. Pada konteks lain pemahaman pluralisme bukan hanya sebagai "kebaikan negative" (*negative good*), yang hanya sekedar mengatasi dan menyingkirkan fanatisme (*to keep fanaticism*), menjadi tidak sejati dan fungsional. Nurcholish Majid mengatakan pluralisme harus dipahami sebagai "Pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan keadaban (*genuine*

engagement of diversities within the bonds of civility). Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan pengimbangan yang dihasilkannya. Dalam kitab suci justru disebutkan bahwa Allah menciptakan mekanisme pengawasan dan pengimbangan antara sesama manusia guna memelihara keutuhan bumi, dan merupakan salah satu wujud kemurahan Tuhan yang melimpah kepada umat manusia “seandainya Allah tidak mengembangki segolongan manusia dengan segolongan yang lain, maka pastilah bumi hancur, namun Allah mempunyai kemurahan yang melimpah kepada seluruh alam.” (Q.S. Al-baqara, 2: 251).

Beragama yang mengakui dan menerima realitas yang plural akan mampu membina dan menciptakan harmoni kehidupan. Sedangkan beragama yang menolak realitas plural akan menjadi kekuatan yang destruktif. Pengakuan dan penerimaan terhadap multikulturalisme tidak terbatas pada pluralitas etnis dan agama yang ada tetapi dalam konteks yang lebih luas yaitu mengakui dan menerima identitas kultural yang tumbuh dan melekat pada masyarakat tersebut sebagai hasil karsa akal budi manusia itu sendiri. Apabila agama mampu ditransformasikan pada level aksi yang mengakui dan menerima realitas multikulturalisme seperti diatas, maka *pela ,gandong larvul ngabal aini-ain* akan mendapat spirit dari agama orang basudara tersebut (*salam* dan *sarane*) – sehingga agama dan budaya bukan lagi menjadi kekuatan yang bersifat *vis-à-vis*, tetapi menjadi kekuatan yang integratif bagi transformasi masyarakat yang multikultural.

Berangkat dari perspektif tersebut, saat ini di beberapa perguruan tinggi di Maluku seperti di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) dan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon sedang digagas sebuah pemikiran teologi baru yaitu “teologi orang basudara”

(TOB). Yang menjadi premis utama sebagai dasar epistemologi TOB ini adalah realitas kepelbagaian masyarakat Maluku dengan segala hasanah kearifan lokalnya. Karena pranata-pranata budaya orang Maluku memang memberi ruang yang luas untuk kita hidup dalam kebersamaan. Ini berarti keberagaman orang Maluku harus memiliki pijakan kultural. Bahwa meskipun kita hadir sebagai orang yang berbeda agama, sebagai seorang *salam* (muslim) atau seorang *sarane* (Kristen), namun kita memiliki suatu horizon kebudayaan – *Siwalima* – yang menjadi “*kalimatun sawa*” (titik temu). Karena itu ke-islam-an atau ke-kristen-an orang Maluku harus memiliki karakteristik yang khas kemalukuan.

Landasan pijak bangunan “teologi orang basudara” (TOB) berada dalam perspektif inkulturasi agama dan budaya dan dapat didekati dari beberapa alasan antara lain : *Pertama* , agama harus mengalami proses transformasi agar dapat menjawab tantangan dan kebutuhan yang ada. Agama tidak bisa dipisahkan dan realitas kehidupan sosial budaya, karena sejatinya agama diturunkan untuk manusia sebagai makhluk kebudayaan. Konsekuensinya walaupun Islam itu datangnya dari daerah semenanjung Arabiyah dan Kristen dari Palestina kemudian berkembang di Barat, bukan berarti orang Islam dan orang Kristen Maluku harus kehilangan identitas kulturalnya dan hidup dalam budaya Arab atau Barat. Melainkan tetap hidup sesuai dengan budaya lokal yang ada, dengan kata lain tetap menjadi orang Maluku. Sebab jika menjadi Islam atau Kristen kemudian berakibat pada hilangnya identitas kulturalnya sebenarnya telah bertentangan dengan semangat universalisme agama itu sendiri. Spirit universalisme agama meniscayakan agama dapat dikontekstualisasikan sejalan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Kedua, pada dasarnya agama punya dua aspek, yaitu universalisme dan pertikularisme. Universalisme agama merupakan dasar pijakan bersama, sedangkan partikularisme merupakan

pengejawantahan nilai-nilai universalisme disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat. Dari sini kemudian kita mengenal Islam Arab, Islam India, Islam Pakistan, Islam Malaysia, Islam Indonesia, atau Kristem Belanda, Kristen Jerman, Kristen Inggris, Kristen Indonesia dan sebagainya. Dalam konteks seperti inilah seharusnya Islam dan Kristen yang harus di kembangkan di Maluku menjadi Islam Maluku dan Kristen Maluku.

Ketiga, modal sosial kultural yang ada dalam masyarakat Maluku seperti *pela*, *gandong*, *larvul ngabal*, *aini-ain*, *kalwedo*, *kidabela* dan nilai budaya lainnya mesti dikontekstualisasikan seiring dengan tantangan masyarakat yang semakin multikultural. Tantangan masyarakat multikultural membutuhkan sebuah integrasi multikultural yang lebih holistik dan komprehensif. Sebagai contoh *Pela* dan *Gandong* sebagai kontrak sosial yang dibuat oleh para leluhur orang Maluku tentang saat itu, masih terbatas pada kebutuhan dan tantangan masyarakat yang homogen dan terbatas pada dua atau beberapa buah negeri adat saja. Adapun *larvul ngabal* di Maluku Tenggara walaupun mengingat komunitas yang lebih luas, tetapi ke depan juga memiliki tantangan yang cukup besar, karena perkembangan masyarakat plural yang semakin kompleks serta tingkat dinamika sosial, ekonomi dan politik yang makin tinggi, semestara pada masyarakat Maluku Tenggara sendiri masih kuat budaya *social Stratum* (staratifikasi sosial). Faktor-faktor ini memiliki efek yang cukup signifikan sekaligus sebagai tantangan ikatan-ikatan kultural ke depan. Oleh karena itu sebagai identitas kultural yang telah eksis beratus-ratus tahun, *pela*, *gandong*, *larvul ngabal*, *kalwedo* dan *kidabela* sangat penting untuk ditransformasikan agar tetap kontekstual dan tidak kehilangan perannya di dalam masyarakat Maluku yang religious.

Adapun prinsip-prinsip dasar dari teologi orang basudara, yaitu: **Pertama**, inklusif. Beragama secara terbuka untuk dapat

hidup saling menerima walaupun berbeda. Orang Islam (*salam*), orang Kristen (*sarane*) dan agama-agama lain di Maluku tidak bersifat eksklusif di dalam berhubungan dengan orang lain. Ungkapan terkenal *katong samua basudara* (kita semua orang bersaudara) adalah merupakan cerminan dari sikap terbuka dalam menerima perbedaan dalam satu semangat persaudaran.

Kedua, pluralis. Seorang yang inklusif dapat menjadi pluralis. Adanya kesadaran bahwa realitas pluralisme yang ada merupakan kehendak ilahi. Pluralisme juga merupakan wujud keutuhan dan kesempurnaan hidup, seorang tidak akan utuh tanpa ada orang lain yang berbeda dengan dirinya. Dalam petuah orang Maluku, yaitu: "*salam seng lengkap kalo seng ada sarane, dan sarane seng lengkap kalo seng ada salam*" (Islam tidak akan lengkap kalau tidak ada Kristen, dan Kristen tidak akan lengkap kalau tidak ada Islam). Hal ini juga sejalan dengan akar budaya yang merupakan kosmologi orang Maluku yang bersifat monodualistis, yaitu *Siwalima*.

Ketiga, akomodatif. Beragama secara kontekstual, yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal, sebagai cara beragama *orang basudara*; dan **Keempat**, egaliter. Yaitu saling menghargai, saling melindungi dan saling menopang. Hal ini merupakan konsekuensi dari semangat *orang basudara*. Sesuai dengan ungkapan bijak orang Maluku: "*potong di kuku rasa di daging*", "*sagu salempeng di bagi dua*", (sepotong sagu dibagi dua) serta "*ale rasa beta rasa*" (kamu rasa, saya juga rasa). Ungkapan-ungkapan ini mengandung nilai-nilai persaudaraan yang sangat dalam demikian juga dengan semangat tolong menolong dan kerjasama, seperti *masohi*, *ma'anu*, *badati* dan yang lainnya.

Dengan gagasan "teologi orang basudara" seperti dikemukakan, maka kita memiliki optimisme bahwa hubungan Islam dan Kristen di Maluku ke depan akan senantiasa harmonis,

karena nilai-nilai *local wisdom* menjadi spirit sejati untuk hubungan *salam* dan *sarane* di Maluku.

Peran IAIN Ambon dalam Pembangunan Perdamaian di Maluku

Tidak dapat dipungkiri bahwa usaha untuk membangun perdamaian adalah sebuah usaha yang harus dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah berakhir. Karena konsekuensi dari sebuah komunitas masyarakat yang plural selalu meniscayakan gesekan sosial dan bahkan konflik sosial. Dari aspek ini maka pembangunan perdamaian tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, apalagi menjadi tanggung jawab aparat keamanan, TNI dan Polri semata? Pembangunan perdamaian menjadi proses yang terus berkelanjutan (*sustainable peace*) dan melibatkan semua masyarakat.

Pendidikan menempati posisi penting di dalam pembangunan dan pemberadaban masyarakat. Sadar akan peran penting pendidikan, maka saat ini telah diupayakan untuk mentransformasi nilai-nilai *local wisdom* ke dalam kurikulum muatan lokal yang dikenal dengan *Pendidikan Orang Basudara* (POB). Tujuannya antara lain untuk memperkenalkan budaya dan nilai-nilai lokal untuk anak didik. Sehubungan dengan itu, peran lembaga pendidikan tinggi di Maluku juga sangat penting dan strategis.

IAIN Ambon sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi keagamaan di Maluku sejak awal telah memandang penting untuk mengambil peran dalam pembangunan perdamaian dan rekonsiliasi di Maluku. Beberapa orang tenaga akademisi IAIN Ambon turut berperan aktif dalam usaha-usaha rekonsiliasi masyarakat ketika konflik terjadi. Mereka ini kemudian ikut serta dalam Pertemuan Maluku di Malino (12 Pebruari 2002) yang menghasilkan kesepakatan bersama yang kita kenal dengan

“Perjanjian Maluku di Malino”. Sementara itu sejauh menyangkut dengan peran formal internal kelembagaan dalam upaya pembangunan perdamaian di Maluku, beberapa rumusan kebijakan strategis dapat dijelaskan antara lain:

Pertama, Meletakkan proses akademik pada semangat integrasi keilmuan, keislaman, kemanusiaan, sains, budaya dan teknologi yang berbasiskan pada kesadaran multikultural. Di sini Basis kesadaran multikultural menjadi bagian penting pada rumusan Visi besar IAIN Ambon. Dengan merumuskan visi seperti ini diharapkan bahwa semua aktifitas akademik dan kajian keislaman atau sains dan budaya di IAIN Ambon berada dalam semangat atau kesadaran kepelbagaian, multikultural. Dengan begitu Islam yang menjadi sumber kajian di IAIN Ambon bukanlah Islam yang eksklusif, melainkan Islam yang inklusif dan menghargai kepelbagaian. IAIN Ambon dengan perannya sebagai pusat pengkajian dan pengembangan Islam tidak akan membangun tembok-tembok pemisah yang eksklusif, melainkan membangun jembatan-jembatan perjumpaan dengan semua.

Kedua, Mendirikan Pusat Studi Mediasi dan Rekonsiliasi (*Ambon Reconciliation and Mediation Center - ARMC*). Menyadari akan pentingnya keberlanjutan perdamaian, maka *ARMC* di dirikan di IAIN Ambon dengan perannya untuk mengadvokasi masyarakat dalam mensosialisasikan pentingnya perdamaian. Lembaga ini telah bekerja sama dengan berbagai stake holders dalam dan luar negeri guna memfasilitasi masyarakat untuk penguatan dan sosialisasi ide serta program-program perdamaian dalam masyarakat. Selain itu juga lembaga ini menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pengembangan masyarakat.

Ketiga, IAIN Ambon juga aktif dalam proses penelitian dan pengabdian yang berbasiskan pada penguatan visi multikultural.

Penelitian yang dilakukan selain berhubungan dengan pengembangan kompetensi keilmuan, namun banyak penelitian yang dilakukan dengan bertemakan revitalisasi hasanah-hasanah kearifan lokal untuk kepentingan perdamaian. Selain itu juga mendesain model-model pengabdian masyarakat yang bertujuan pemberdayaan mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang berbasiskan pada potensi lokal.

Keempat, mendesain kembali kurikulum dengan memboboti muatan kurikulum yang mewajibkan setiap mahasiswa untuk mengambil mata kuliah Multikultural (Pengantar Studi Multikultural) serta mata kuliah Islam dan Budaya Maluku. Redesain kurikulum ini bertujuan menjawab visi besar IAIN Ambon seperti dijelaskan di atas.

Kelima, Mentransformasikan budaya *pela* dan *gandong* lintas negeri (desa) menjadi *pela* dan *gandong* lintas kampus. IAIN Ambon telah membentuk *pela* lintas kampus dengan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) dan *gandong* dengan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian *pela* dan *gandong* lintas kampus ini akan dijabarkan dengan program-program bersama seperti pertukaran dosen, riset bersama, dan kegiatan kemahasiswaan bersama.

Keenam, Merintis berbagai kerja sama lintas sektoral dengan berbagai elemen masyarakat (Pemda, TNI/Polri, Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk menciptakan perdamaian yang langgeng dan berkelanjutan.

Penutup

Sebagai catatan akhir dari tulisan dapat dikemukakan beberapa kesimpulan antara lain :

Pertama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralis dilihat dari berbagai aspek, baik pluralis suku, budaya agama, bahasa dan sebagainya. Pluralisme sesungguhnya telah lama eksis di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Dengan demikian pluralism di satu pihak pelbagai konflik dan kekerasan social yang terjadi pasca reformasi saat ini mengindikasikan bahwa problem kesadaran pluralism bangsa perlu dapat perhatian serius.

Kedua, menguatnya politik identitas agama dapat berpotensi memicu konflik, untuk itu perlu adanya transformasi pemikiran dan sikap keberagamaan dengan merubah pandangan keberagamaan yang eksklusif kepada pandangan yang lebih inklusif dan pluralis.

Ketiga, dalam konteks Maluku transformasi budaya local merupakan hal penting karena menjadi prsyarat untuk membangun suatu perspektif baru bagi hubungan keberagamaan yang bisa saling menyapa yang berbasiskan pada budaya *orang basudara*. Untuk itu perlu dieksplorasi gagasan-gagasan baru mengenai "Teologi orang basudara". Yang di harapkan menjadi suatu jalan tengah untuk mejembatani kesenjangan dialog agama-agama di Maluku.

Keempat, pendidikan menempati peran strategis di dalam pembangunan dan pemberadaban manusia. Untuk peran ini, IAIN Ambon dalam rangka pembangunan perdamaian di Maluku telah dilakukan sejak awal konflik Maluku dengan diikutsertakan akademisi IAIN Ambon dalam Pertemuan Maluku di Malino. Selanjutnya secara intitusional usaha pihak institusi untuk memelihara keberlanjutan perdamaian ini antara lain dilakukan dengan merumuskan kembali Visi dan Misi IAIN Ambon yang kemudian dijabarkan kedalam berbagai program aksi.

Daftar Rujukan

- D'Adam, Arthur J. *Science Without Bonds, A Synthesis of science, Religion and Mystics*, 1955
- Madjid, Nurcholish, "Masyarakat Madani dan investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan", *Republika*, 10 Agustus 1999.
- Mubarak, Husni, "Memahami Kembali Arti Keragaman: Dimens Eksisitenial, Sosial dan Intitusional", dalam *Harmony, Jurnal Multikulturan dan Multireligius*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, No. 35 Vol. IX, Thn 2010.
- Munawar Rachman, Budhy, "Berteologi dalam Konteks Agama-agama", *Republika*, 22 Januari 1996.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Siap Terbuka dalam Beragama*, Bandung, Mizan, 1996.
- Toisuta, Hasbolah, *Robohnya Baileo Kami : Refleki atas Persoalan, Perdamaian, Demokrasi dan Pluraitas Masyarakat Maluku*, Ygyakarta, Idea Pres, 2010
- , dkk. Damai-Damai Maluku, dalam, Alpha Amirrachman (ed.), *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*. ICIP & European commission, 2007.
- www.ethnologue.com & www.wikipedia.com